

## **BAB III**

### **ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.**

Isu – isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 ( lima ) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu-isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program KBPP serta Renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta kebijakan dalam jangka menengah ( RPJMD ) Semesta Berencana 2016-2021

Mengacu alternatif strategis dengan analisis SWOT di atas , maka dapat dirangkum rumusan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi jangka panjang ;
2. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);

3. Meningkatkan pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
4. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
5. Memanfaatkan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
6. Meminimalkan kesenjangan gender dalam pembangunan
7. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
8. Meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, trafficking
9. Meningkatkan keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik
10. Masih ada beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender
11. Meminimalkan kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari pada laki laki
12. Membuat data terpilah dan informasi KB dan PP
13. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
14. Memanfaatkan Sarana dan prasarana

### **III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

“ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan “

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”. Kota yang dimaksud dalam RPJPD adalah budaya yg bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih , budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh

falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bias memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak lagi sesuai dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertical ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bias memastikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

#### MISI.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan focus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arah RPJPD, focus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local.
3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local, sesuai dengan misi 2 RPJPD, yaitu : menguatkan system ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastic, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbaagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJBD yaitu: mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan pencipta

iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.

4. Misi 4, yaitu: peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan misi 2 RPJPD yaitu: mewujudkan penguatan system ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Misi 5, yaitu: penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan misi 4 RPJPD, yaitu: mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program sangat tergantung pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap factor keamanan, kondisi ini bias dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah system yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk. (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia(SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan IPTEK, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada Kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan ketentuan masyarakat yang mengarah padakemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan

terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu social dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung,

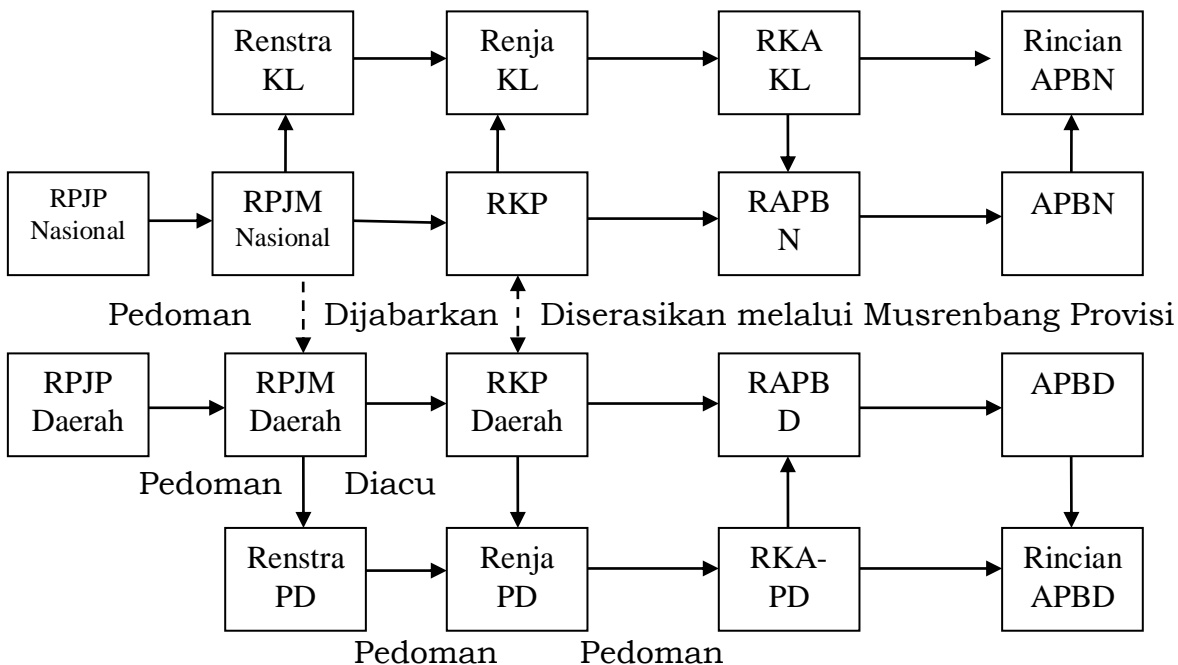
Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD yang ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kenijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1 yaitu: Penguatan diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic, dan cita 8: melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2 yaitu : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local, sesuai dengan cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3 yaitu : Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hokum (low enforcement), sesuai dengan cita 2: mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, cita 4: memperkuat kehadiran Negara

dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

4. Misi 4 yaitu peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan cita 3: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, dan Cita6 : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
5. Misi 5 yaitu : penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana,sesui dengan cita 1: menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, dan cita 9 : memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

### III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi



### III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

### Lingkungan

#### Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No	Hasil KLHSTer kait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengarusutaman Gender.	Minimnya anggaran untuk implementasi pengarusutaman gender pada program-program	Budaya patriarkial masyarakat.	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
2	Pengendalian Angka Kelahiran.	Pelaksanaan program Keluarga Berencana tidak optimal.	Masyarakat miskin pendidikan rendah, mengutamakan anak laki-laki.	Biaya membesarkan anak semakin mahal
3	Kesehatan Reproduksi.	Koordinasi program antar sektor belum berjalan dengan baik, akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi belum	Bukan program prioritas sehingga anggaran terbatas, kemiskinan dan pendidikan yang rendah.	Hubungan keluarga yang kondusif.
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pendampingan korban KDRT belum optimal.	Budaya patriarki dimana pria mendominasi.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

No	Hasil KLHSTer kait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.	Program keluarga berencana kurang mendapat prioritas.	Anak laki-laki lebih didambakan, stereotipe lelaki Bali yang malas dan tidak mengutamakan perempuan.	Penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

### III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### 1. Isu Strategis

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun;
2. Partisipasi Pria dalam ber KB masih Rendah
3. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);
4. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
5. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
6. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
7. Masih ada kesenjangan gender dalam pembangunan
8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
9. Masih ada kejadian tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan Kekerasan terhadap anak
10. Masih rendahnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
11. Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik

12. Masih adanya beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender
13. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan daripada laki laki
14. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang
15. Sarana dan prasarana kurang memadai
16. Terbatasnya anggaran